

PERAN STRATEGI KEPEMIMPINAN KRISIS DALAM MENANGGULANGI BENCANA ALAM DI KOTA MEDAN

THE ROLE OF CRISIS LEADERSHIP STRATEGY IN DEALING WITH NATURAL DISASTERS IN MEDAN CITY

¹⁾Tonna Balya, ²⁾Fitri Yani

^{1,2)}Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik Ilmu Komputer, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum.

Universitas Potensi Utama

Jalan KL.Yos Sudarso, K.M. 6,5 No. 3A Medan

*Email: tonnabalya79@gmail.com, Pidana80@gmail.com.

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi akibat kondisi geografis, geologis, dan iklimnya. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi kepemimpinan krisis yang efektif untuk mengurangi risiko bencana sekaligus menjaga stabilitas nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategi kepemimpinan krisis dalam menanggulangi bencana alam guna memastikan ketahanan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), melalui analisis berbagai literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang berkaitan dengan kepemimpinan krisis dan penanggulangan bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam mengambil keputusan secara cepat, melakukan koordinasi lintas sektor, membangun komunikasi yang efektif, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem peringatan dini. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan respons yang terintegrasi. Penguatan kapasitas kepemimpinan melalui pendidikan, pelatihan, simulasi kebencanaan, dan penyusunan kebijakan berbasis mitigasi risiko merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Dengan demikian, strategi kepemimpinan krisis tidak hanya berperan dalam meminimalkan dampak bencana alam, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan kemampuan bangsa dalam mengantisipasi, merespons, dan memulihkan kondisi pascabencana secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Kepemimpinan Krisis, Bencana Alam, Penanggulangan Bencana.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana alam tertinggi di dunia. Kondisi geografis Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, serta berada di kawasan Cincin Api Pasifik (*Ring of Fire*), menyebabkan wilayah Indonesia sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Selain faktor geologis, perubahan iklim global turut meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi yang berdampak pada kehidupan masyarakat, pembangunan nasional, serta stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut menjadikan penanggulangan bencana sebagai salah satu prioritas strategis dalam mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa jumlah kejadian bencana di Indonesia cenderung meningkat setiap tahun, dengan dominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Tingginya intensitas bencana tersebut tidak hanya

mengakibatkan korban jiwa dan kerugian ekonomi, tetapi juga mengganggu pelayanan publik, aktivitas pemerintahan, serta stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sistem penanggulangan bencana yang mampu merespons secara cepat, tepat, terkoordinasi, dan adaptif terhadap berbagai kondisi krisis.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penanggulangan bencana adalah kepemimpinan krisis (*crisis leadership*). Kepemimpinan krisis merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan secara cepat, mengelola ketidakpastian, mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan, serta membangun komunikasi yang efektif selama situasi darurat berlangsung. Dalam konteks kebencanaan, seorang pemimpin tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan strategis dalam mengintegrasikan sumber daya, mengelola informasi, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepemimpinan yang efektif akan menentukan kecepatan respons, efisiensi distribusi bantuan, serta keberhasilan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Berbagai permasalahan masih ditemukan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Koordinasi antarinstansi sering kali belum berjalan secara optimal akibat perbedaan kewenangan, keterbatasan komunikasi, serta belum terintegrasinya sistem informasi kebencanaan. Selain itu, kapasitas kepemimpinan pada berbagai tingkatan pemerintahan dalam menghadapi situasi krisis masih beragam sehingga memengaruhi efektivitas pengambilan keputusan. Keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi, sistem peringatan dini, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan dalam mengelola situasi krisis secara terpadu.

Isu lain yang berkembang adalah meningkatnya kompleksitas ancaman bencana akibat perubahan iklim, urbanisasi, pertumbuhan penduduk, serta meningkatnya ketergantungan terhadap infrastruktur kritis. Kondisi tersebut menuntut perubahan paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada tanggap darurat menuju pendekatan pengurangan risiko bencana yang menekankan aspek mitigasi, kesiapsiagaan, dan pembangunan ketahanan masyarakat. Dalam perspektif ketahanan nasional, penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan sinergi seluruh komponen bangsa yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, akademisi, media, dan masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan manajemen krisis. Boin, Hart, Stern, dan Sundelius (2017) menyatakan bahwa keberhasilan seorang pemimpin dalam menghadapi krisis ditentukan oleh kemampuannya dalam memahami situasi, mengambil keputusan secara cepat, mengoordinasikan berbagai aktor, serta membangun komunikasi publik yang mampu menciptakan kepercayaan masyarakat. Sementara itu, penelitian Kapucu dan Van Wart (2008) menjelaskan bahwa koordinasi antarlembaga dan kolaborasi lintas sektor merupakan faktor utama dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana, khususnya pada negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Comfort (2007) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi, sistem komunikasi yang terintegrasi, dan jaringan kolaboratif mampu meningkatkan kapasitas organisasi dalam merespons situasi darurat secara lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, laporan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030* yang diterbitkan oleh United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) menegaskan bahwa penguatan tata kelola risiko bencana dan kepemimpinan yang efektif merupakan salah satu prioritas utama dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa strategi kepemimpinan krisis menjadi elemen fundamental dalam menciptakan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan berkelanjutan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas mengenai manajemen bencana maupun kepemimpinan krisis, sebagian besar masih berfokus pada aspek operasional tanggap darurat atau koordinasi kelembagaan secara parsial. Kajian yang mengintegrasikan strategi kepemimpinan krisis dengan perspektif ketahanan nasional masih relatif terbatas. Padahal, ketahanan nasional menuntut adanya kemampuan seluruh komponen bangsa dalam mengantisipasi, menghadapi, dan memulihkan diri dari berbagai ancaman, termasuk bencana alam. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif mengenai bagaimana strategi kepemimpinan krisis dapat mendukung efektivitas penanggulangan bencana sekaligus memperkuat ketahanan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategi kepemimpinan krisis dalam penanggulangan bencana alam di kota Medan guna memastikan ketahanan nasional dan faktor yang mendukung dan menghambat penerapan strategi kepemimpinan krisis dalam penanggulangan bencana alam di Kota Medan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan ilmu kepemimpinan krisis serta menjadi masukan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan ketahanan nasional.

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Penanggulangan Bencana

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, maupun manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Republik Indonesia, 2007). Penanggulangan bencana merupakan seluruh rangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko terhadap bencana, kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Konsep ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang berkesinambungan (continuous process), bukan hanya tindakan pada saat bencana terjadi.

Dalam perspektif manajemen bencana modern, penanggulangan bencana dilaksanakan melalui *Disaster Management Cycle* yang terdiri atas empat tahapan utama, yaitu:

1. Mitigasi (Mitigation)
2. Kesiapsiagaan (Preparedness)
3. Tanggap Darurat (Response)
4. Pemulihan (Recovery)

Keempat tahapan tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu siklus yang bertujuan mengurangi risiko bencana serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman (Coppola, 2020). United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) melalui *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030* menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian dari pembangunan nasional. Empat prioritas utama yang ditekankan adalah memahami risiko bencana, memperkuat tata kelola risiko, meningkatkan investasi dalam pengurangan risiko bencana, serta meningkatkan kesiapsiagaan untuk membangun kembali secara lebih baik (*Build Back Better*) setelah bencana (UNDRR, 2015).

Dengan demikian, keberhasilan penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan, koordinasi antarlembaga, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta partisipasi aktif masyarakat.

2. Teori Kepemimpinan Krisis (*Crisis Leadership*)

Kepemimpinan krisis merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam mengelola organisasi ketika menghadapi kondisi yang penuh ketidakpastian, tekanan waktu, serta konsekuensi yang besar terhadap masyarakat. Boin, Hart, Stern, dan Sundelius (2017) menyatakan bahwa pemimpin dalam situasi krisis memiliki lima tugas utama (*Five Critical Tasks of Crisis Leadership*), yaitu:

1. Sense Making

Kemampuan memahami situasi krisis secara cepat melalui identifikasi fakta, analisis risiko, dan pengumpulan informasi sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi nyata.

2. Decision Making

Kemampuan mengambil keputusan secara cepat walaupun informasi yang tersedia belum lengkap. Dalam situasi krisis, keterlambatan pengambilan keputusan sering kali menimbulkan dampak yang lebih besar dibandingkan risiko keputusan yang kurang sempurna.

3. Meaning Making

Kemampuan membangun komunikasi publik sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar, mengurangi kepanikan, serta meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah.

4. Terminating

Kemampuan mengakhiri fase krisis melalui pengendalian situasi, normalisasi pelayanan publik, serta transisi menuju tahap pemulihan.

5. Learning

Kemampuan mengevaluasi seluruh proses penanganan krisis sebagai pembelajaran organisasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi krisis di masa mendatang.

Kelima dimensi tersebut menjelaskan bahwa kepemimpinan krisis bukan hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga mencakup kemampuan strategis, komunikasi, koordinasi, dan pembelajaran organisasi.

3. Teori Manajemen Krisis

Coombs (2015) mendefinisikan manajemen krisis sebagai proses sistematis yang dilakukan organisasi untuk mencegah, mempersiapkan, merespons, dan memulihkan kondisi setelah terjadinya krisis. Menurut Coombs (2015), manajemen krisis terdiri atas tiga tahap utama, yaitu:

a. Pre-Crisis

Tahap sebelum krisis yang meliputi identifikasi risiko, mitigasi, penyusunan rencana kontinjensi, pelatihan, simulasi, dan penyusunan sistem peringatan dini.

b. Crisis Response

Tahap ketika krisis berlangsung yang menitikberatkan pada pengambilan keputusan, koordinasi lintas organisasi, komunikasi publik, serta mobilisasi sumber daya.

c. Post-Crisis

Tahap pemulihan yang meliputi rehabilitasi, rekonstruksi, evaluasi, serta pembelajaran organisasi agar kapasitas menghadapi krisis semakin meningkat.

Comfort (2007) menambahkan bahwa efektivitas manajemen krisis sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola informasi, membangun jaringan komunikasi, dan memanfaatkan teknologi digital. Organisasi yang memiliki sistem informasi terintegrasi cenderung mampu mengambil keputusan lebih cepat dibandingkan organisasi yang masih menggunakan sistem koordinasi konvensional.

Penanggulangan bencana merupakan bentuk *collaborative governance*, yaitu tata kelola yang melibatkan berbagai aktor lintas sektor dalam mencapai tujuan bersama. Kapucu dan Van Wart (2008) menjelaskan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun koordinasi antarlembaga, berbagi informasi, membentuk jaringan kerja sama, dan mengintegrasikan sumber daya. Kolaborasi diperlukan karena tidak ada satu lembaga yang memiliki seluruh sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi bencana. Oleh sebab itu, keberhasilan penanggulangan bencana sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, TNI, Polri, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, akademisi, media, serta masyarakat.

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang menunjukkan kemampuan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Bencana alam merupakan salah satu ancaman nonmiliter yang dapat memengaruhi seluruh aspek tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penanggulangan bencana menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Dalam konteks ini, kepemimpinan krisis berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan, stabilitas sosial, keberlanjutan pembangunan, serta kepercayaan masyarakat selama terjadi bencana.

Hubungan Strategi Kepemimpinan Krisis dengan Penanggulangan Bencana. Keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki pemerintah, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan dalam mengelola sumber daya tersebut. Pemimpin yang mampu mengambil keputusan secara cepat, mengintegrasikan informasi, membangun koordinasi lintas sektor, serta berkomunikasi secara efektif akan meningkatkan kecepatan respons, ketepatan distribusi bantuan, dan efektivitas pemulihan pascabencana. Sebaliknya, lemahnya kepemimpinan akan menyebabkan keterlambatan koordinasi, tumpang tindih kewenangan, rendahnya kepercayaan masyarakat, serta meningkatnya dampak bencana.

Dengan demikian, strategi kepemimpinan krisis berpengaruh langsung terhadap efektivitas penanggulangan bencana dan secara tidak langsung memperkuat ketahanan nasional. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa strategi kepemimpinan krisis merupakan variabel utama yang memengaruhi efektivitas penanggulangan bencana. Strategi tersebut diwujudkan melalui kemampuan pengambilan keputusan, koordinasi lintas sektor, komunikasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Efektivitas penanggulangan bencana selanjutnya berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan nasional melalui berkurangnya risiko korban jiwa, kerugian ekonomi, terganggunya pelayanan publik, serta meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

C. METODE

Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis strategi kepemimpinan krisis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan mengintegrasikan perspektif manajemen bencana, kepemimpinan krisis, dan ketahanan nasional. Analisis difokuskan pada identifikasi peran pemimpin dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, penelitian ini mengkaji efektivitas koordinasi antar lembaga, mekanisme pengambilan keputusan, komunikasi krisis, pemanfaatan teknologi informasi, serta kolaborasi multipihak sebagai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penanggulangan bencana. Hasil analisis tersebut digunakan untuk merumuskan strategi kepemimpinan krisis yang lebih adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika ancaman bencana di Indonesia.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat tata kelola penanggulangan bencana secara terpadu. Rekomendasi yang dihasilkan diarahkan pada penguatan kapasitas kepemimpinan di berbagai tingkatan pemerintahan, peningkatan integrasi sistem informasi kebencanaan, optimalisasi koordinasi lintas sektor, pengembangan sistem komunikasi krisis yang efektif, serta peningkatan partisipasi

masyarakat dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Dengan demikian, strategi kepemimpinan krisis tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas penanggulangan bencana, tetapi juga mendukung terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Strategi Kepemimpinan Krisis dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Medan.

Strategi kepemimpinan krisis memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana alam di Kota Medan. Kepemimpinan krisis tidak hanya berorientasi pada kemampuan mengambil keputusan secara cepat dalam kondisi darurat, tetapi juga mencakup kemampuan mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan, mengelola sumber daya yang tersedia, serta memastikan komunikasi yang efektif kepada masyarakat. Dalam konteks Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang menghadapi potensi bencana seperti banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor di wilayah sekitarnya, kepemimpinan yang responsif menjadi faktor utama dalam meminimalkan dampak bencana.

Strategi kepemimpinan krisis diwujudkan melalui koordinasi antara pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, instansi teknis, organisasi kemasyarakatan, relawan, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut memungkinkan proses penanganan bencana berjalan lebih cepat, mulai dari tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Keberhasilan koordinasi antarlembaga menunjukkan bahwa kepemimpinan krisis tidak hanya bergantung pada seorang pemimpin, tetapi juga pada kemampuan membangun kerja sama lintas sektor.

Sejalan dengan teori **Arjen Boin** yang menyatakan bahwa kepemimpinan krisis mencakup lima tugas utama, yaitu *sense making* (memahami situasi krisis), *decision making* (pengambilan keputusan), *meaning making* (membangun komunikasi publik), *terminating* (mengakhiri kondisi krisis), dan *learning* (melakukan evaluasi serta pembelajaran). Dalam konteks Kota Medan, kelima aspek tersebut tercermin melalui identifikasi wilayah rawan bencana, pembentukan posko tanggap darurat, penyampaian informasi kepada masyarakat, koordinasi penanganan bencana, serta evaluasi terhadap setiap kejadian bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan pada masa mendatang.

Tahap mitigasi, strategi kepemimpinan terlihat melalui penyusunan rencana kontinjensi, sosialisasi kebencanaan, pemetaan wilayah rawan bencana, serta pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sehingga risiko korban jiwa maupun kerugian material dapat ditekan. Pada tahap tanggap darurat, pemimpin dituntut mampu mengambil keputusan secara cepat berdasarkan informasi yang akurat, mengoordinasikan distribusi bantuan, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi.

Pada tahap *sense making*, pemerintah melakukan pemantauan terhadap kondisi cuaca, tinggi muka air sungai, dan wilayah yang berpotensi mengalami banjir. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih cepat sehingga risiko korban jiwa dapat diminimalkan.

Selanjutnya, pada tahap *decision making*, pimpinan daerah bersama BPBD mengambil keputusan mengenai penetapan status siaga atau tanggap darurat, mobilisasi personel, distribusi logistik, serta pengerahan peralatan penyelamatan. Kecepatan pengambilan keputusan menjadi faktor penting dalam mengurangi dampak bencana.

Pada aspek *meaning making*, komunikasi publik dilakukan melalui media massa, media sosial, dan koordinasi langsung dengan aparat kewilayahan. Penyampaian informasi yang jelas mengenai kondisi bencana, lokasi pengungsian, dan prosedur evakuasi membantu masyarakat memperoleh informasi yang benar sekaligus mengurangi kepanikan akibat penyebaran informasi yang tidak akurat. Tahap *terminating* diwujudkan melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,

seperti pembersihan lingkungan, perbaikan infrastruktur, penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak, serta pemulihan pelayanan publik. Setelah kondisi mulai stabil, pemerintah melakukan evaluasi terhadap seluruh proses penanganan bencana sebagai bagian dari tahap learning. Evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi bencana berikutnya.

Dari perspektif ketahanan nasional, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kepemimpinan krisis berkontribusi dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat. Penanggulangan bencana yang efektif mampu mengurangi kerugian ekonomi, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mempercepat pemulihan aktivitas sosial. Kondisi tersebut mendukung terwujudnya ketahanan nasional sebagaimana dikemukakan dalam konsep ketahanan nasional, yaitu kemampuan bangsa untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tanpa mengganggu keberlangsungan pembangunan nasional.

Selain itu, kepemimpinan krisis juga berperan dalam membangun komunikasi publik yang transparan. Penyampaian informasi yang jelas mengenai kondisi bencana, jalur evakuasi, lokasi pengungsian, dan perkembangan penanganan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Komunikasi yang efektif juga mengurangi penyebaran informasi yang tidak benar sehingga masyarakat dapat mengambil tindakan yang tepat selama masa krisis. Dalam perspektif Astagatra, keberhasilan penanggulangan bencana di Kota Medan memperkuat beberapa aspek ketahanan nasional, yaitu ketahanan sosial melalui meningkatnya solidaritas masyarakat, ketahanan ekonomi melalui percepatan pemulihan aktivitas ekonomi, ketahanan politik melalui meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta ketahanan keamanan melalui terciptanya stabilitas wilayah selama proses penanganan bencana. Dengan demikian, strategi kepemimpinan krisis memiliki peran strategis tidak hanya dalam menyelesaikan keadaan darurat, tetapi juga dalam menjaga keberlangsungan pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Perspektif ketahanan nasional, keberhasilan strategi kepemimpinan krisis di Kota Medan memberikan kontribusi terhadap terjaganya stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Penanggulangan bencana yang berjalan efektif mampu mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat sehingga gangguan terhadap pembangunan daerah dapat diminimalkan. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep ketahanan nasional yang menekankan kemampuan suatu daerah dalam menghadapi, mengatasi, dan memulihkan diri dari berbagai ancaman, termasuk bencana alam. Dengan demikian, semakin baik strategi kepemimpinan krisis yang diterapkan, semakin kuat pula kontribusinya dalam mendukung ketahanan nasional.

2. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Penerapan Strategi Kepemimpinan Krisis dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Medan

Keberhasilan penerapan strategi kepemimpinan krisis dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung. Salah satu faktor utama adalah adanya koordinasi yang baik antarinstansi. Sinergi antara pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, dinas kesehatan, dinas sosial, organisasi kemanusiaan, serta relawan memungkinkan pembagian tugas dan tanggung jawab dilakukan secara jelas sehingga proses penanganan bencana menjadi lebih efektif. Faktor pendukung lainnya adalah ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam penanggulangan bencana. Aparatur yang telah mengikuti pelatihan kebencanaan, didukung oleh relawan yang berpengalaman, mampu meningkatkan kualitas respons saat terjadi bencana. Selain itu, penggunaan teknologi informasi, seperti sistem peringatan dini, pemantauan cuaca, komunikasi digital, serta media sosial, turut mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat sehingga risiko dapat dikurangi.

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor yang sangat menentukan. Kesadaran masyarakat dalam mengikuti sosialisasi kebencanaan, menjaga lingkungan, serta berpartisipasi dalam kegiatan mitigasi merupakan modal sosial yang memperkuat efektivitas kepemimpinan krisis. Dukungan masyarakat menciptakan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan warga dalam menghadapi bencana.

Di sisi lain, penelitian juga menemukan beberapa faktor penghambat. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran yang memengaruhi penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, termasuk peralatan evakuasi, logistik, dan fasilitas pendukung lainnya. Keterbatasan tersebut dapat mengurangi kecepatan dan efektivitas penanganan ketika bencana terjadi.

Selain faktor-faktor diatas ada beberapa faktor lainnya yang menjadi pendukung yakni:

Faktor pertama adalah tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang kebencanaan. Personel BPBD, TNI, Polri, tenaga kesehatan, relawan, serta organisasi kemanusiaan memiliki pengalaman dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan operasi penanggulangan bencana. Kompetensi tersebut meningkatkan efektivitas proses evakuasi, penyelamatan korban, dan distribusi bantuan.

Faktor kedua adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi kebencanaan, data prakiraan cuaca dari BMKG, media sosial, serta aplikasi komunikasi digital mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga proses koordinasi menjadi lebih efektif.

Selain itu, tingginya partisipasi masyarakat juga menjadi faktor pendukung yang penting. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan mitigasi, gotong royong, pelaporan kondisi lapangan, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana menunjukkan bahwa keberhasilan kepemimpinan krisis sangat dipengaruhi oleh dukungan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengurangan risiko bencana.

Faktor penghambat berikutnya adalah masih adanya kendala koordinasi pada situasi tertentu, terutama ketika melibatkan banyak instansi dengan kewenangan yang berbeda. Perbedaan prosedur operasional, keterlambatan penyampaian informasi, serta birokrasi dapat menghambat proses pengambilan keputusan dalam kondisi darurat. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana masih belum merata. Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya kesiapsiagaan maupun prosedur evakuasi sehingga masih ditemukan perilaku yang meningkatkan risiko saat terjadi bencana. Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi kebencanaan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menghadapi bencana.

Perubahan iklim yang menyebabkan meningkatnya intensitas curah hujan serta pesatnya pertumbuhan wilayah perkotaan juga menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Medan. Kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya sehingga strategi kepemimpinan krisis harus terus disesuaikan dengan dinamika risiko yang berkembang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas strategi kepemimpinan krisis tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas pemimpin, tetapi juga oleh dukungan kelembagaan, sumber daya, teknologi, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi kebencanaan, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah strategis untuk memperkuat penanggulangan bencana di Kota Medan.

Faktor penghambat. Keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan, seperti kendaraan operasional, alat evakuasi, logistik, serta peralatan penyelamatan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kecepatan respons ketika terjadi bencana dengan skala yang lebih besar. Hambatan berikutnya adalah masih adanya kendala koordinasi pada situasi tertentu, terutama ketika terjadi bencana yang memerlukan keterlibatan banyak instansi secara bersamaan. Perbedaan prosedur kerja, birokrasi, dan keterlambatan penyampaian informasi dapat memengaruhi efektivitas pengambilan keputusan.

Kesadaran masyarakat mengenai mitigasi bencana masih perlu ditingkatkan. Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya menjaga lingkungan, mengikuti prosedur evakuasi, maupun berpartisipasi dalam kegiatan kesiapsiagaan. Rendahnya literasi kebencanaan menyebabkan masyarakat cenderung bersifat reaktif dibandingkan preventif. Selain faktor internal, perubahan iklim, meningkatnya curah hujan ekstrem, pertumbuhan kawasan permukiman, serta berkurangnya

daerah resapan air turut meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi di Kota Medan. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk terus memperkuat strategi kepemimpinan krisis melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem peringatan dini, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas strategi kepemimpinan krisis dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam membangun koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Semakin baik strategi tersebut diterapkan, semakin tinggi pula kemampuan Kota Medan dalam mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketahanan nasional melalui terciptanya masyarakat yang tangguh, adaptif, dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana.

Upaya tersebut pada akhirnya akan mendukung terwujudnya ketahanan nasional melalui peningkatan kemampuan daerah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana secara efektif, cepat, dan berkelanjutan.

E. KESIMPULAN

Strategi kepemimpinan krisis memiliki peran yang strategis dalam penanggulangan bencana alam di Kota Medan sebagai upaya memperkuat ketahanan nasional. Peran tersebut diwujudkan melalui kemampuan pemimpin dalam membangun koordinasi lintas sektor, mengambil keputusan secara cepat dan tepat, mengelola komunikasi publik, serta mengintegrasikan tahapan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara terpadu. Penerapan strategi kepemimpinan krisis mampu meningkatkan efektivitas penanganan bencana, mempercepat proses pemulihan, mengurangi risiko kerugian, serta menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan krisis tidak hanya berfungsi sebagai instrumen manajemen bencana, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas daerah untuk mendukung ketahanan nasional.

Keberhasilan penerapan strategi kepemimpinan krisis dipengaruhi oleh sinergi antarlembaga, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi aktif masyarakat. Di sisi lain, efektivitas implementasi strategi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana kebencanaan, koordinasi lintas instansi yang belum optimal pada situasi tertentu, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, optimalisasi sistem informasi dan peringatan dini, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kepemimpinan krisis dalam penanggulangan bencana alam sehingga terwujud tata kelola kebencanaan yang adaptif, tangguh, dan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan nasional.

F. DAFTAR PUSTAKA

- (a) Cone, J. D. (1999). Observational assessment: Measure development and research issues. Dalam P. C. Kendall, J. N. Butcher, & G. N. Holmbeck (Eds.), *Handbook of research methods in clinical psychology* (hlm. 183-223). New York: Wiley.
- (b) Boin, A., Hart, P., Stern, E., & Sundelius, B. The Politics of Crisis Management (edisi terbaru).
- (c) Van Wart, M., Kapucu, N., dkk. (2021) tentang collaborative leadership dalam manajemen krisis.
- (d) Mishra, B. K., & Dahal, K. (2024) mengenai shared responsibility dalam manajemen bencana.
- (e) Syukron, M., dkk. (2024) mengenai aplikasi dan teknologi pendukung penanggulangan bencana.

- (f) Data dan kebijakan terbaru BNPB terkait resiliensi dan kolaborasi penanggulangan bencana.
- (g) Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- (h) Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020–2024*. Jakarta: BNPB.
- (i) Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2022). *Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia*. Jakarta: Lemhannas RI.
- (j) Buku ini menjelaskan lima tugas utama kepemimpinan krisis (*sense making, decision making, meaning making, terminating, dan learning*) yang banyak digunakan dalam penelitian administrasi publik. ([Utrecht University](#))
- (k) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- (l) Menjadi dasar hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, termasuk peran pemerintah daerah, BPBD, dan masyarakat. ([BNPB](#))

